

BAB IV

PENYELENGGAAN

URUSAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. URUSAN WAJIB

4.1.1. URUSAN PENDIDIKAN

Guna meningkatkan pelayanan pendidikan secara profesional, maka Dinas Pendidikan Kota Jambi telah menyusun rencana pembangunan bidang pendidikan yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Jambi tahun 2013-2018, yaitu dalam rangka “Mewujudkan Masyarakat Kota Jambi Yang Berakhlak, Berbudaya, dan Berdaya Saing” dengan Misi “Meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat Kota Jambi melalui pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata”.

Selain itu, Renstra Dinas Pendidikan disusun dengan mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang memiliki Visi; “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan Kebudayaan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia yang Cerdas dan Berkarakter Kuat”, dengan misi sebagai berikut : 1). Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan dan kebudayaan; 2). Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan dan kebudayaan; 3). Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kebudayaan; 4). Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan dan kebudayaan; 5). Menjamin kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan; dan 6). Melestarikan dan memperkuat Bahasa dan Kebudayaan Indonesia.

Sebagaimana kebijakan pemerintah Kota Jambi yang ingin mewujudkan sumber daya manusia Kota Jambi yang produktif dan berdaya saing” maka, melalui program Tiga Tahun Kota Jambi Bangkit, untuk bidang pendidikan pemerintah Kota Jambi telah meluncurkan program sekolah bebas pungutan dan pemberian beasiswa bagi semua siswa miskin, serta kegiatan pengadaan pakaian seragam dan peralatan sekolah dari tingkat SD sampai SMA/SMK bagi siswa kurang mampu yaitu di tiga Sekolah Swasta di Kota Jambi Melalui program ini diharapkan tidak ada lagi putra-putri daerah Kota Jambi yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik dan layak.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi adalah sebesar Rp. 594.776.610.584,- terdiri dari :

Belanja Tidak Langsung sebesar	Rp. 537.062.217.084,-
Belanja Langsung sebesar	<u>Rp. 57.714.393.500,-</u>
Jumlah	Rp. 594.776.610.584,-

Jika dibandingkan dengan Total Belanja APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2016 yaitu sebesar Rp. 1.712.022.855.320,- maka persentase anggaran untuk belanja fungsi pendidikan adalah sebesar 34,74 persen. Angka ini telah memenuhi persentase minimal yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pasal 2, ayat (1) bahwa alokasi anggaran belanja fungsi pendidikan ditetapkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen).

Dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN/APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pasal 2, ayat (1) bahwa Alokasi anggaran belanja fungsi pendidikan ditetapkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen). Selanjutnya ayat (2) disebutkan bahwa alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara anggaran belanja fungsi pendidikan terhadap seluruh belanja APBD. Pasal 3 disebutkan bahwa alokasi belanja fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi belanja modal, belanja barang, belanja pegawai, belanja bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja hibah. Pasal 6 menyatakan belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan struktural, tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru, dan tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru.

Pada tahun anggaran 2016, anggaran Dinas Pendidikan Kota Jambi yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung untuk membiayai program dan kegiatan urusan pendidikan yang telah dilaksanakan baik untuk peningkatan sarana/prasarana maupun peningkatan mutu, yaitu; Program pelayanan administrasi perkantoran dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.598.620.000,- terealisasi Rp. 3.146.451.399,- (87,43%), Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.590.592.500,- terealisasi Rp. 1.431.002.020,- (89,97%), Program peningkatan disiplin aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.403.000.000,- terealisasi Rp. 2.393.142.000,- (99,59%), Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 324.000.000,- terealisasi Rp. 237.174.830,- (73,20%), Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 59.921.000,- terealisasi Rp. 58.796.000,- (98,12%), Program Perencanaan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.420.000,- terealisasi Rp. 32.420.000,- (100%), Program Pengembangan Data/Informasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 444.470.000,- terealisasi Rp. 289.564.500,- (65,15%), Program

Peningkatan Akses, Mutu dan Tata Kelola Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.261.370.000,- terealisasi Rp. 46.347.180.349,- (94,08%).

Sesuai dengan target RPJMD Kota Jambi pada bidang pendidikan, indikator kinerja Utama Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada usia sekolah pada tahun 2016 ditargetkan 82,10%, terealisasi 93.15%. Indikator kinerja utama Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) pada tahun 2016 ditargetkan 11,05%, sampai saat ini belum dapat diketahui realisasinya dikarenakan data BPS belum dipublikasikan. Indikator kinerja utama jumlah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi pada tahun 2016 ditargetkan 91,57%, terealisasi sebesar 88,91%. Indikator kinerja utama jumlah sekolah sesuai SNP pada semua jenjang pendidikan pada tahun 2016 ditargetkan 75%, terealisasi sebesar 73%.

Permasalahan yang dihadapi didalam pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan pada umumnya tidak terlalu signifikan sehingga dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran pembangunan pendidikan antara lain adalah keterbatasan waktu dan lokasi sekolah yang akan dilaksanakan sebagian besar berada pada daerah dengan topografi yang berada di atas rawa.

Adapun prestasi yang dicapai oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel : 4.1
Penghargaan Bidang Pendidikan
Yang diterima Pemerintah Kota Jambi Tahun 2016

No	NAMA PENGHARGAAN	PENYELENGGARA	YANG MEMBERI PENGHARGAAN
1	Kihajar Award	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

No	Nama Siswa/Guru	Prestasi Nasional	Nama Sekolah/Lembaga	Jenis Lomba
A. Kepala Sekolah				
1	Drs. Firdaus	Juara Nasional	SMP Negeri 4 Kota Jambi	Sekolah Adiwiyata Mandiri Kategori SMP
2	Budiyanto, M.Pd	Juara Nasional	SMP Negeri 7 Kota Jambi	Sekolah Adiwiyata Nasional Kategori SMP
3	Sujono, M.Pd	Juara Nasional	SMK Negeri 4 Kota Jambi	Sekolah Adiwiyata Nasional Kategori SMK
4	Supaini, S.Pd	Juara Nasional	SD Negeri 60 Kota Jambi	Sekolah Adiwiyata Nasional Kategori SD

5	Jamil, S.Pd		Juara 1	SMP Negeri 24 Kota Jambi
6	Witzir, S.Pd	Juara 3	SD IT Nurul Ilmi Kota Jambi	Lomba Budaya Mutu SD Swasta Komponen Pembelajaran
B. Guru				
1	Dr. Sofyan, M.Pd	Juara 1	SMA Negeri 2 Kota Jambi	Inovasi Pembelajaran
2	Solbi, M.Pd	Juara 1	SMA Luar Biasa Prof.Dr. Sri Soedewi MS	Menulis Artikel pada Simposium Guru dan Tenaga Kependidikan Tingkat Nasional
3	Nopi Arahman	Juara 1	Instruktur PalComTech Jambi	Apresiasi GTK PAUD dan Dimas Tingkat Nasional Kategori Instruktur Kursus
4	Kemas Sudirman, SPd.I	Juara 2	SD Negeri 70 Kota Jambi	Guru Pendidikan Agama Islam
5	Yul Pendri, M.Pd	Juara 3	SD Negeri 47 Kota Jambi	Lomba Karya Tulis Ilmiah
C. Siswa				
1	Aulia Murti	Juara 1	SMP Negeri 1 Kota Jambi	Lomba Cipta Puisi Tingkat Sekolah Pertama
2	Theodorico Liwandi Lutan	Juara 1	SMK Unggul Sakti	Debat Lomba Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing Siswa SMK tingkat Nasional
3	Elora Maulina	Juara 1	SD Islam Al Falah Jambi	Lomba Cipta Pantun dalam Apresiasi Sastra Siswa SD
4	Gempita Anjaly Pierda	Juara 1	SMK Negeri 2 Kota Jambi	Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (Penulis Cerpen)
5	Zairliana Mayanti		Juara 1	SD Negeri 181 Kota Jambi
6	Axel Keefe Beltsazar		Juara 1	SD Xaverius 2 Kota Jambi
7	Chelsea Rasita Rehulina Sembiring		Juara 1	SD Xaverius 2 Kota Jambi
8	Nanda Yolani Pratiwi		Juara 1	SD Negeri 140 Kota Jambi
9	Keyza Fajar Azzaky		Juara 1	SD Al Falah Kota Jambi
10	Nayla Brigita Putri		Juara 1	SD Negeri 74 Kota Jambi
11	Eunike Felice		Juara 1	TK Xaverius 2
12	Cintya Aura Diya		Juara 1	SMA Negeri 6 Kota Jambi

13	Christdanmark Hutaaruk	Juara 1	SD Kristen Bina Kasih Jambi	Kejuraan Gavrila Gymnastic International Festival yang ke 4
14	Dhiaz Chebastian	Juara 2	SMK Unggul Sakti	LKS IT Software Application
15	Rhesnafia Tri Okta	Juara 2	SMP Negeri 7 Kota Jambi	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) cabang Karate (Komite Putri)
16	Benekditus Sidharta	Juara 2	SDS Xaverius 1 Kota Jambi	Olimpiade Sains Nasional bidang IPA
17	Sonia Ariani S	Juara 2	SMP Negeri 5 Kota Jambi	Kejurnas PPLP Panahan Tingkat Nasional
18	Zairliana Mayanti		Juara 2	SD Negeri 181 Kota Jambi
19	Silvi Wulandari	Juara 2	SMP Negeri 6 Kota Jambi	Kejuraan Nasional Judo Junior Klas 40 Kg
20	Tsabitah Aristawati	Juara 3	SMP Negeri 7 Kota Jambi	Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional cabang Lomba Seni Lukis
21	Felicia Priskilla	Juara 3	SMP Kristen Bina Kasih	OSN Matematika Tingkat Nasional
22	Jesslyn	Juara 3	SMK Unggul Sakti	Lomba LKS Accounting
23	Rhesnafia Tri Okta	Juara 3	SMP Negeri 7 Kota Jambi	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) cabang Karate (Kata Putri)
24	Elsa Nasya	Juara 3	SMP Negeri 11 Kota Jambi	Lomba Penelitian Siswa Nasional
25	M Kemas Ali	Juara 3	SMP Negeri 11 Kota Jambi	Lomba Penelitian Siswa Nasional
26	Fadhillah Ahmadi	Juara 3	SMP Negeri 11 Kota Jambi	Lomba Penelitian Siswa Nasional
27	Angelin Natasya	Juara 3	SMP Negeri 11 Kota Jambi	Kejuaraan Judo antar PPLP se Indonesia
28	Meiranti Ibtria Desti	Juara 3	SMK Negeri 4 Kota Jambi	Pekan Paralympic Nasional Cabang Atletik (Tolak Peluru)
29	Andini Segonang	Juara 3	SMK Negeri 4 Kota Jambi	Pekan Paralympic Nasional Cabang Pentanque
30	Nadia Angraini	Juara 3	SMKS Attaufiq Jambi	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Pencak Silat Putri
31	Andrew Saputra	Juara 3	SMP Negeri 5 Kota Jambi	Kejurnas PPLP cabang Senam

4.1.2. URUSAN KESEHATAN

Urusan Kesehatan merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi dan RSUD H. Abdul Manap. Kesehatan merupakan hak dasar yang wajib diterima oleh setiap manusia. Tanpa adanya taraf kesehatan yang layak dan baik diterima oleh masyarakat, sasaran dan tujuan pembangunan tidak akan dapat tercapai dengan baik. Dapat dikatakan bahwa, sukses atau tidaknya pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh baiknya kualitas kesehatan bangsa tersebut. Kualitas kesehatan masyarakat suatu bangsa merupakan tanggung jawab semua komponen masyarakat, baik itu dari sisi masyarakat, pemerintah dan *stakeholders*. Seluruh komponen tersebut harus secara bersama dan bersinergi bekerja sama membangun kualitas kesehatan masyarakat.

Pemerintah Kota Jambi melalui visi dan misi Walikota Jambi, telah menetapkan misi “Mewujudkan masyarakat kota yang berakhlak, berbudaya dan berdaya saing”. Melalui misi tersebut, ditetapkan tujuan “peningkatan pelayanan kesehatan dan revitalisasi infrastruktur kesehatan”. Sasaran dari tujuan ini adalah, tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat untuk semua. Adapun strategi yang diterapkan untuk mewujudkan misi ini adalah, dengan peningkatan mutu dan akses kesehatan. Dengan adanya strategi tersebut, arah kebijakan yang ditempuh adalah dengan meningkatkan mutu tenaga medis dan paramedis, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, dan meningkatkan pelayanan kesehatan. Keseluruhan langkah strategis ini dicapai untuk mewujudkan Kota Jambi Bangkit Tahun 2016.

Pembangunan Kesehatan Kota Jambi Tahun 2016 diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat yang memberikan prioritas pada upaya kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak dalam kandungan sampai usia lanjut. Selain itu pembangunan bidang kesehatan Kota Jambi diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Sementara itu, kehadiran sebuah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) bagi masyarakat Kota Jambi sangatlah dibutuhkan. Selain biaya pelayanan kesehatan yang terjangkau, fasilitas dan peralatan yang lengkap, dan kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor penting bagi keberhasilan sebuah Rumah Sakit. Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi memberikan

pelayanan kesehatan tanpa membeda-bedakan tingkat sosial masyarakat. RSUD H. Abdul Manap melayani pasien umum, pasien pengguna kartu Jamkesmas, Jamkesmasda, Askes/BPJS, Jamsostek, dan Trimitra.

Pada tahun 2016, total anggaran belanja daerah untuk urusan kesehatan dalam APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 119.179.727.877,- terdiri dari:

• Belanja/ Langsung Dinas Kesehatan Kota Jambi	Rp. 72.158.318.620,-
• Belanja Langsung RSUD. H. Abdul Manap	<u>Rp. 47.021.409.257,-</u>
Jumlah	Rp. 119.179.727.877,-

Dinas Kesehatan Kota Jambi pada tahun anggaran 2016 menganggarkan belanja langsung untuk 7 (tujuh) program dan 44 (empat puluh empat) kegiatan yang telah dilaksanakan baik pembangunan fisik maupun non fisik. Realisasi keuangan untuk penyerapan anggaran belanja langsung Dinas Kesehatan Kota Jambi pada tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 53,153,595,521,- (73,66%) dari total target anggaran TA 2016 sebesar Rp. 72,158,318,620,-. Sesuai dengan target RPJMD Kota Jambi pada bidang kesehatan, pada tahun 2016 terealisasi target 100%, 5 unit jumlah puskesmas dengan pelayanan 24 jam. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi dalam pelaksanaan urusan wajib di bidang kesehatan antara lain, penyusunan program dan penganggaran Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahun 2016, belum mengacu pada penetapan indikator pencapaian 17 (tujuh belas) Sasaran *Grand Strategy* Departemen Kesehatan Republik Indonesia, melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 457/2008, dan disesuaikan pula dengan visi Pemda Kota yaitu "Terwujudnya Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya". Hasil kegiatan program pembangunan kesehatan yang melalui anggaran keuangan tahunan daerah masih belum mengacu pada SPM Kesehatan dengan mempedomani Peraturan Menkes RI Nomor 741/2008 dan yang terakhir, masih ada kegiatan yang tidak dapat teralisasi 100% dikarenakan karena adanya keterlambatan dalam Penetapan Petunjuk Pelaksanaan kegiatan.

Prestasi yang didapat Dinas Kesehatan Kota Jambi pada tahun 2016 antara lain, Juara III Dokter Teladan Tingkat Provinsi Jambi atas nama drg Gubrialdi dan Juara I Lomba Puskesmas Berprestasi Tingkat Provinsi (Puskesmas Simpang Kawat).

RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi pada tahun anggaran 2016 menganggarkan belanja langsung untuk melaksanakan 33 kegiatan dalam 7 program untuk memenuhi 5 sasaran strategik. Realisasi keuangan untuk penyerapan anggaran belanja langsung RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi pada tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 44,309,916,057,- (94,23%) dari total target anggaran 2016 sebesar Rp. 47,021.409,257,-.

Permasalahan yang dihadapi oleh RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi dalam pelaksanaan urusan wajib di bidang kesehatan adalah masih banyak program dan kegiatan yang belum mencapai target yang diinginkan sehingga masih banyak pembenahan bagi pihak rumah sakit untuk lebih meningkatkan kinerja dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sarana dan prasana pelayanan di rumah sakit dengan melengkapi peralatan kesehatan, pembenahan ruang dan gedung serta penampilan rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan lebih maksimal. Adapun prestasi yang didapat RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi pada tahun 2016 adalah sebagai motivator Rumah Sakit Sayang Ibu dan Anak (tingkat Provinsi Jambi).

4.1.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Urusan Pekerjaan Umum merupakan urusan wajib yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi. Namun kedepan dengan diterbitkannya PP 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terhitung mulai 1 Januari 2017 Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi akan diubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi. Hal ini tentunya akan berimplikasi pada Tupoksi Dinas, artinya tidak hanya sebagai eksekutor dalam upaya peningkatan kapasitas, kuantitas dan kualitas serta kontinuitas infrastruktur, akan tetapi juga diharapkan mampu melaksanakan fungsinya sebagai perencanaan, pemanfaatan serta pengawasan pengendalian ruang di Kota Jambi.

Pada tahun 2016 urusan pekerjaan umum dijabarkan dalam 4 (empat) program dan 8 (delapan) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 332.060.159.601 telah terealisasi sebesar Rp. 315.186.314.165 atau sebesar 94,92% dari total anggaran, dengan capaian realisasi fisik sebesar 97,25%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa silpa yang mencapai 5% lebih dari total anggaran tentunya diharapkan dapat menurun pada masa mendatang, hal ini dapat diwujudkan melalui perbaikan sinergitas internal serta peningkatan kualitas perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum.

Sejalan dengan itu, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018 pada Urusan Pekerjaan Umum dijabarkan dalam misi 1 (satu) yaitu membangun infrastruktur perkotaan yang merata dan berwawasan lingkungan. Dengan indikator kinerja daerah meningkatkan Rasio panjang jaringan jalan dan drainase yang baik serta penurunan luas kawasan kumuh yang bertujuan dengan tujuan untuk meningkatkan dan mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkualitas. Pada tahun 2016 urusan pekerjaan umum memiliki target harus dicapai dalam RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, yaitu :

1. Target rasio panjang jaringan jalan yang baik sebesar 82 % atau sepanjang 418,57 km dari total panjang jalan Kota Jambi 510,452 km pada tahun 2016 telah mencapai 90,00% atau sepanjang 459.406,8 km.
2. Rasio panjang drainase dalam kondisi baik sebesar 80,00% atau sepanjang 97,60 km dari total panjang drainase Kota Jambi 127,2 km dan terealisasi sebesar 84,20% atau sepanjang 107,10 km.
3. Rasio luas kawasan kumuh per luas wilayah sebesar 0,60% atau 413,46 Ha dari total luas kawasan kumuh Kota Jambi seluas 165 Ha dan terealisasi sebesar 0,88% atau seluas 1,19 Ha, pada tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum fokus pada dokumen perencanaan penanganan kawasan kumuh Kota Jambi sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 700 Tahun 2013, akan tetapi kegiatan penanganan tetap dilaksanakan khususnya pembangunan jalan lingkungan dan drainase.

Secara umum urusan pekerjaan umum telah melampaui target indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018, akan tetapi tentunya dinilai masih perlu dilakukan peningkatan kualitas serta totalitas penanganan infrastruktur, sehingga umur pembangunan fisik yang dihasilkan lebih lama dan dapat menekan anggaran dalam pemeliharaan rutin nantinya.

4.1.4. URUSAN PERUMAHAN

Urusan Perumahan merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Penataan Ruang, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, serta Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran yang dijabarkan dalam 4 (empat) program dan 18 (delapan belas) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 70.034.678.300 dan terealisasi keuangan sebesar Rp. 65.777.866.671 atau sebesar 93,92% dan realisasi fisik sebesar 98,42%.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018 pada Urusan Perumahan dijabarkan dalam misi 1 yaitu membangun infrastruktur perkotaan yang merata dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan dan mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas cakupan pelayanan infrastruktur dasar antara lain cakupan pelayanan jaringan air minum dan kecukupan lampu penerangan jalan umum dan lampu taman serta pengurangan Kawasan Kumuh.

Pada tahun 2016 urusan wajib perumahan memiliki target harus dicapai dalam RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, yaitu :

1. Cakupan pelayanan jaringan air minum per jumlah rumah sebesar 75% dan terealisasi sebesar 72,25%, dimana mengalami peningkatan 8,25% dari kondisi awal pada akhir tahun 2015 yaitu sebesar 64%.
2. Kecukupan lampu penerangan jalan umum dan lampu taman sebesar 78.41% atau sebanyak 13.421 titik dan terrealisasi sebesar 75.47% atau sebanyak 12.917 titik dari total kebutuhan selama 5 tahun sebanyak 17.116 titik, dimana pada tahun 2016 terpasang sebanyak 846 titik terdiri dari 402 titik dengan sistem LED dan 444 titik sistem Non LED .

Urusan perumahan secara kelembagaan terdapat Dinas Tata Ruang dan Perumahan yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni, sebagai informasi jumlah perumahan yang dibangun oleh pengembang sebanyak 367 lokasi dan jumlah rumah sebanyak 118.000 unit dengan angka backlog sebesar 18.000 unit.

Pada Tahun 2016 Pemerintah Kota Jambi mendapat Program Pengurangan Kawasan Kumuh melalui SNVT Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) pada 3 (tiga) Lokasi yaitu: Kelurahan Tanjung Sari, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Legok. Selain dari itu terdapat Program Rumah Tidak Layak Huni melalui SNVT Penyediaan Perumahan Prov. Jambi dimana untuk Kota Jambi mendapat bantuan sebanyak 250 unit rumah tersebar pada 10 Kelurahan di Kota Jambi, dengan nilai bantuan dari Rp. 7.500.000,- sampai Rp. 15.000.000,- dan di tahun 2017 mendapat bantuan sebanyak 232 unit rumah.

Dan untuk Tahun 2016 Pemerintah Kota Jambi juga mengusulkan Pembangunan Rumah Susun Sewa yang diperuntukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah khusus Tenaga Medis yang dibangun pada Lokasi RSUD Abdul Manap Kota Jambi sebanyak 1 (satu) Tower yang terdiri dari 70 (tujuh puluh) unit type 36, melalui SNVT Penyediaan Perumahan.

Terakhir dapat disampaikan bahwa pada urusan perumahan terdapat juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran adapun misi Memberikan pelayanan prima dalam bidang pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan korban bencana, Meningkatkan peran serta masyarakat, swasta dan instansi pemerintah dalam bidang pencegahan, penanggulangan, penyelamatan dan rekondisi korban bencana.

Strategi yang dilakukan terkait dengan urusan perumahan adalah dengan cara melaksanakan koordinasi perizinan pembangunan gedung (IMB), Izin penggunaan bangunan dan Izin lokasi (Rekomendasi keruangan).

Dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana dan kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran didukung dengan :

- a. 1 (satu) unit Mako;
- b. 4 (empat) unit Posyankar yaitu Jambi Selatan, Jambi Timur, Kota Baru dan Danau Teluk;
- c. 4 (empat) unit Fire Truck kapasitas 10.000 liter;
- d. 5 (lima) unit Fire Truck Kapasitas 5.000 liter;
- e. 1 (satu) unit Fire Truck Kapasitas 4.000 liter;
- f. 3 (tiga) unit Fire Truck Kapasitas 3.000 liter;
- g. 1 (satu) unit Mobil Pompa;
- h. 1 (satu) unit Mobil Rescue;
- i. 1 (satu) unit Gerobak Motor Pemadam;
- j. 1 (satu) unit Mobil Pasukan;
- k. 5 (lima) unit Perahu Karet;
- l. 125 (seratus dua puluh lima) orang Satgas.

Dengan kondisi yang dimiliki pada tahun 2016 BPBD dan Damkar masih memiliki respon time sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang penanggulangan kebakaran yaitu selama 15 menit dari pos terdekat menuju lokasi kebakaran.

4.1.5. URUSAN PENATAAN RUANG

Pelaksanaan urusan Penataan Ruang Pemerintah Kota Jambi pada tahun 2016 di laksanakan pada dua SKPD, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Tata Ruang dan Perumahan. Dimana pelaksanaannya terangkum pada 1 program yang dijabarkan dalam 4 kegiatan, dengan alokasi anggaran pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2.483.745.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 2.089.850.013,- atau 84,14% dari total yang di anggarkan pada tahun 2016. Besaran silpa yang mencapai 15% lebih tentunya bukan suatu hal yang baik dalam kacamata perencanaan, kedepan diharapkan kepada Dinas Tata Ruang dan Perumahan untuk lebih jeli dalam menyusun perencanaan kegiatan.

Pada urusan Penataan Ruang sebagaimana di tetapkan dalam RPJMD bahwa target indikator daerah untuk urusan penataan ruang adalah rasio ketaatan terhadap RTRW sebesar 100% setiap tahunnya. Target capaian ini di wujudkan dengan cara tertib pemberian perizinan yang sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam Perda No. 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang terdiri dari rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan dan rencana kawasan strategis. Namun demikian, pada tahun 2016 terdapat 150.550

bangunan ber-IMB di Kota Jambi, dimana 9.500 bangunan diantaranya termasuk dalam kategori melanggar atau pembangunan dilaksanakan tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Dengan demikian capaian target kesesuaian ruang pada tahun 2016 adalah sebesar 93,69% atau masih terdapat margin sebesar 6,31% margin bangunan yang harus ditertibkan. Kondisi ini menuntut peningkatan kinerja dan profesionalisme instansi teknis pelaksana fungsi pengawasan dan pengendalian ruang serta pemberian rekomendasi perizinan.

Disamping itu, kondisi ini tentunya harus didukung dengan penyediaan regulasi peraturan zonasi sebagai turunan untuk mengimplementasikan Perda Tata Ruang berupa dokumen rencana untuk menganalisis dan menciptakan program dan kegiatan yang menjadi skala prioritas penganggaran guna merealisasikan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dalam Perda tata ruang sehingga dapat menjawab berbagai persoalan perkotaan yang harus segera diselesaikan.

Dalam pelaksanaan operasional terkait tata ruang, saat ini hanya berdasarkan rencana umum RTRW sehingga untuk mengambil keputusan untuk fungsi bangunan yang belum diatur dalam Perda No. 9 Tahun 2013 sulit dilakukan secara tepat. Sebagai contoh, banyak izin yang dikeluarkan berdasarkan Perda RTRW Kota Jambi Tahun 2000-2010, terutama bangunan gudang yang tidak sesuai dengan Perda RTRW Kota Jambi 2013-2033. Dengan telah rampungnya penyusunan RDTR untuk BWK II, III, V dan VI pada tahun 2016 artinya telah melengkapi penyusunan RDTR Kota Jambi yang telah dilaksanakan dari tahun 2015 dan diharapkan dapat segera di sahkan menjadi Perda pada tahun 2017 mendatang sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian ruang di Kota Jambi.

4.1.6. URUSAN PERENCANAAN

Urusan wajib bidang perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi.

Alokasi anggaran untuk melaksanakan urusan Perencanaan Pembangunan, anggaran yang dialokasikan yaitu sebesar Rp 7.527.887.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 7.236.576.475,- atau 96,13 %, sedangkan realisasi fisiknya sebesar 95,84%.

Selanjutnya untuk melaksanakan urusan perencanaan pembangunan Bappeda Kota Jambi pada Tahun 2016 melaksanakan 8 Program dengan 30 Kegiatan yang antara lain melaksanakan Sistem Perencanaan Daerah (SIMREDA), menyusun Buku Statistik Kota Jambi Tahun 2015, melaksanakan Forum SKPD Musrenbang RKPD Tingkat Kota Jambi tahun 2016 untuk perencanaan 2017, menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2017, buku Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2016, buku KUA PPAS Tahun Anggaran 2017 dan buku KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran

2016, buku Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban (LKPJ) dan Summary LKPJ Walikota Jambi tahun 2015, menyusun laporan pelaksanaan DAK dan Tugas Pembantuan tahun 2016 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005, melaksanakan koordinasi dengan SKPD dan *stakeholders* lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan bidang infrastruktur, bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan sumberdaya manusia di Kota Jambi; menyusun dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP); memfasilitasi kegiatan DAK, *Sewerage System*, *Waste to Energy*, Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) serta rencana pembangunan TPA *Sanitary Landfill*; memfasilitasi kerjasama Pemerintah Kota Jambi dengan PT. Telkom dan PT. Mitratel; memfasilitasi usulan SKPD ke Pemerintah Pusat untuk pendanaan pembangunan Kota Jambi; menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA); menyusun Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD); menyusun dokumen Dinamika Pembangunan Kota Jambi; menyusun Kajian Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kota Jambi; menyusun Dokumen Study Kelayakan (FS) Pembangunan Industri Daerah Kota Jambi; menyusun Kajian Potensi PAD Pajak Parkir dan Retribusi Parkir; melaksanakan Lomba Karya Tulis Ilmiah Sekolah Tingkat Menengah dan mengirim peserta LKTI ke tingkat Propinsi Jambi; menyusun Studi Investasi Daerah, melaksanakan kajian Aksi Mitigasi terhadap Bencana; melaksanakan kajian Efektifitas Sertifikasi Tenaga Pendidik Tingkat SD di Kota Jambi; melaksanakan Kajian Pemanfaatan Teknologi dalam Pengembangan UMKM serta Efektifitas Modal Promosi Pemasaran Produk UMKM; melaksanakan Koordinasi Pembangunan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Jambi; serta melaksanakan kegiatan non urusan lainnya seperti peningkatan sarana prasarana kantor; menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisari realisasi kinerja Bappeda; melaksanakan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi maupun instansi terkait lainnya.

4.1.7. URUSAN PERHUBUNGAN

Selanjutnya, untuk Urusan Perhubungan pada Kantor Pengelola Parkir Kota Jambi telah dialokasikan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.2.239.104.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.823.735.261,- atau sebesar 87,54%.

Berkenaan dengan alokasi dana yang dianggarkan pada Kantor Pengelola Parkir Kota Jambi tersebut, telah dilaksanakan program kegiatan untuk peningkatan efektifitas operasional pemungutan retribusi parkir, pembayaran premi asuransi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi juru parkir, penyediaan papan informasi parkir, pembatas kecepatan kendaraan, pemasangan

besi pembatas, pengadaan palang parkir untuk *barrier gate*, melaksanakan razia juru parkir liar, pengawas petugas parkir, serta melaksanakan pengaturan parkir.

4.1.8. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Melihat Kondidi lingkungan hidup di kota Jambi secara umum sudah sangat memprihatinkan, sehingga sangat mendesak di lakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dulu hanya di pikirkan bagaimana mengelola limbah cair, gas dan padat, artinya pengelolaan di lakukan setelah limbah itu terjadi. Pada paradigma baru, tidak semata berfokus pada pengolahan limbah, tapi upaya untuk menghindari, meminimalisir, dan memitigasi (merehabilitasi) limbah juga menjadi pemikiran utama. Makanya pengelolaan lingkungan lebih di tarik ke ranah hulu mulai darimperencanaan, formulasi kebijakan, sehingga pelaksanaan kegiatan usaha. Pada setiap siklus usaha di upayakan mereduksi dampak lingkungan opsi pengelolaan lingkungan seperti Kajian lingkungan hidup strategi, intrumen ekonomilingkungan, *polluter must pay principle*, produksi bersih, ISO 14001, dst.

Pada tahap rencana kegiatan maka Amdal,UKL/UPL merupakan instrumen yang harus dipenuhi dengan baik. AMDAL merupakan salah satu instrumen perlindungan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan. Tantangan yang di hadapi Dinas lingkungan Hidup Kota Jambi dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai salah satu instansi pemerintah Daerah Kota Jambi antara lain :

1. Peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus beresiko terhadap kelangsungan sumber daya alam.
2. Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup kota akibat laju pembangunan yang meningkat, jumlah dan kepadatan penduduk yang semakin tinggi serta keterbatasan lahan.
3. Pencemaran lingkungan (air. Udara dan tanah) yang di akibatkan oleh aktivitas manusia (limbah cair rumah tangga/pabrik).

Salah satu target RPJMD Pemerintah Kota Jambi. Dimana fungsi urusan terkait lingkungan hidup ini di laksanakan pada SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, yang diakomodir dalam 10 Program dan tersebar pada 31 kegiatan urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2016. Dengan alokasi anggaran dana APBD sebesar Rp. 5.559.402.000,- telah terealisasi anggaran sebesar Rp,5.248.619.463,- pada tahun 2016 dengan bobot persentase serapan sebesar 94,40 %.

Target Indikator kinerja Daerah yang pertama pada Tahun 2016 dalam Pengendalian kerusakan lingkungan hidup dengan terbentuknya 3 kawasan Kampung Iklim, terbentuknya 2 kelompok bank sampah, terbentuknya 30 Sekolah Adiwiyata, terbentuknya 12 sekolah bank sampah, sebanyak 20 Perusahaan yang telah di bina untuk ikut Profer, tersusunnya sebanyak 15 buah buku Status Lingkungan hidup Daerah dan Basis Data LH.

Target Indikator kinerja Daerah yang kedua pada Tahun 2016 dengan menurunnya beban pencemaran di Kota Jambi karena Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap 50 Perusahaan penghasil dan pengelola limbah berjalan secara baik dan efektif, sosialisasi berjalan dengan sukses, adanya bantuan sebanyak 50 orang duta sanitasi kota Jambi, kualitas udara selalu di pantau dengan melaksanakan uji emisi pada tempat-tempat tertentu, terlaksannya dengan baik koordinasi antar lintas sektoral dalam penentuan sebanyak 86 titik pantau Adipura yang tersebar di 11 Kecamatan dalam kota Jambi.

Target Indikator Kinerja Daerah yang ke tiga pada tahun 2016 dengan meningkatnya pemberian Pelayanan pengujian kadar limbah padat dan cair dengan melakukan pemantauan pemantauan kualitas sumber air sebanyak 23 titik lokasi dan pengambilan 800 sampel limbah yang di uji kualitasnya.

Target Indikator Kinerja Daerah yang ke empat pada Tahun 2016 dengan meningkatnya Pengawasan dan penegakan hukum tentang lingkungan terbukti dengan selesainya seluruh permasalahan atas pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran /perusakan lingkungan hidup sebanyak 25 Pengaduan.

Target Indikator Kinerja Daerah yang kelima pada tahun 2016 sebaiknya terintegrasi dengan rencana kegiatan antar instansi terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup, informasi kondisi lingkungan hidup Kota Jambi dan masih tersedianya kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang refresentatif seperti terlihat pada tabel ini.

No	Nama Ruang Terbuka Hijau	Lokasi (Kecamatan)	Luas (Ha)
1	RTH Hutan Kota	Kota Baru, Telanaipura, Jambi Timur.	524,00
2	RTH Taman	Kota Jambi (tersebar)	875,90
3	RTH sempadan danau	Telanaipura, Danau Teluk	300,00
4	RTH sempadan sungai	Kota Jambi	325,00
5	RTH Jalau Hijau jalan dan pedestrian	Kota Jambi	93,00
6	RTH Makam	Kota Jambi	140,00
7	RTH Kawasan Perkantoran Pemerintah	Kota Baru dan Telanaipura	27,00
8	RTH Fungsi tertentu (sabuk Hijau)	Kota baru dan Telanaipura	376,50

9	RTH fungsi tertentu (lahan pertanian Perkantoran)	Kota Jambi	956,10
		Jumlah	3.617,50

Sumber : DLH Kota Jambi

Ratio RTH terhadap luas wilayah sebesar 9,00%. Pada Tahun 2014 telah dilakukan pengadaan lahan sebanyak 7,17 ha untuk RTH dilokasi Bagan Pete dari total rencana di bagan pete seluas 94 ha dengan penambahan 7,17 ha totalnya menjadi baru mencapai 41,2 Ha, dimana kondisi ini masih sama pada tahun 2016. Target 9,00% dari luas wilayah yang semestinya sudah mencapai 2.191.63 ha namun baru terpenuhi baru terealisasi sebesar 1224.17 ha atau 6.97% dengan kata lain masih sama seperti tahun sebelumnya. Terkait kondisi ini kepada Instansi terkait harus meningkatkan upaya untuk penambahan luasan RTH di Kota Jambi pada tahun berikutnya.

Penurunan tingkat polusi air pada sungai tembuku dan sungai asam terjadi penurunan menjadi 22 s/d 20 mgl. Pada kenyataan hasil pengujian air sungai tembuku dan sungai asam kondisinya agak semakin membaik dengan tingkat polusi mencapai 24,74 mg/L pada tahun 2015 935 mg/L dan kembali mengalami peningkatan kualitas dengan tingkat pencemaran mencapai 24,74 mg/L pada tahun 2016. Hal ini disebabkan kondisi sanitasi lingkungan di kawasan sempadan sungai yang mulai ada pengelolaan melibatkan berbagai instansi terkait seperti Dinas PU, DKPP, Dinas Kesehatan, Bappeda, DLH, Distarum, Camat dan Lurah, serta peran aktif masyarakat dalam menjaga kawasan badan air mulai ada, seperti halnya tidak lagi membuang air limbah maupun sampah ke sungai. Tentunya hal ini akan menjadi perhatian tersendiri pada tahun 2016 partisipasi masyarakat akan lebih meningkat lagi dengan harapan dapat menekan angka pencemaran pada kedua sungai tersebut.

Adapun beberapa prestasi Pemerintah Kota Jambi tahun 2016 antara lain :

1. Penerima penghargaan sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2016 berdasarkan SK Gubernur Jambi Nomor : 828/KEP.GUB/BLHD-5.2/2016 tanggal 09 September 2016.
2. Penerima Anugerah Piala Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.558/Menlhk/Sekjen/Peg.7/7/2016 tanggal 19 Juli 2016.
3. Penetapan sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Jambi pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas berdasarkan SK Walikota Jambi Nomor : 523 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016.

4.1.9. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Dalam Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintah Kota Jambi yaitu Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Jambi. Latar belakang yang menjadi isu strategis didirikannya SKPD ini adalah masalah kependudukan yang saat ini menjadi isu yang mengglobal atau isu nasional, salah satu isu yang paling aktual adalah masalah tingginya kenaikan jumlah penduduk akibat pertumbuhan yang tidak terkendali demikian juga dengan meningkatnya Urbanisasi ke Kota Jambi. Tingginya pertumbuhan penduduk pada suatu Negara atau wilayah, membawa dampak yang beragam, baik dampak positif maupun masalah yang dapat kita sebut sebagai dampak negatif. Dampak positif dari tingginya pertumbuhan penduduk adalah, munculnya angka potensi sumber daya manusia produktif, yang dapat menjadi motor utama penggerak pembangunan suatu bangsa atau wilayah, tentu saja dengan manajemen pengelolaan kependudukan yang tepat, efektif dan efisien karena tersedianya tenaga kerja. Adapun dampak negatif dari tingginya pertumbuhan penduduk adalah masalah kerawanan sosial yang sistematis, dimulai dari tingginya angka kriminalitas, terbatasnya ketersediaan bahan pangan, terbatasnya lapangan pekerjaan, rendahnya standar kesehatan, anomali konflik dan masalah kerawanan lainnya termasuk kerusakan lingkungan.

Oleh karena itu diperlukan langkah strategis yang tepat dan jitu dalam menangani masalah kependudukan pada suatu wilayah. Kota Jambi adalah salah satu kota sedang yang menuju kota besar sebagai ibukota propinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi positif paling pesat di Indonesia, saat ini menjadi magnet bagi mobilitas perpindahan penduduk dari luar daerah kedalam Kota Jambi atau lazimnya dikenal dengan sebutan Urbanisasi. Potensi kerawanan sosial akibat pesatnya pertumbuhan pendudukpun menjadi salah satu isu strategis dalam merencanakan rencana strategis Kota Jambi.

Permasalahan dasar atau Isu strategis yang berkaitan dengan masalah dasar di bidang kependudukan di Kota Jambi adalah belum optimalnya pengelolaan data kependudukan dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melengkapi administrasi kependudukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Tantangan tersebut harus ditangani secara efektif dan tepat sasaran dengan menetapkan program yang tepat pula. Pemerintah Kota Jambi melalui visi dan misi Walikota Jambi, telah menetapkan misi “Mewujudkan pemerintahan yang profesional dan bersih (*Clean governance*)”. Melalui misi tersebut, ditetapkan tujuan “Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good gevernance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*)”. Sasaran dari tujuan ini adalah, tercapainya pemerataan dan kualitas pelayanan publik. Adapun strategi yang diterapkan untuk mewujudkan misi ini adalah, dengan peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya strategi tersebut, arah kebijakan yang ditempuh adalah dengan menerapkan SOP dalam pelayanan publik. Keseluruhan langkah strategis ini dicapai untuk mewujudkan Kota Jambi Bangkit Tahun 2016.

Pada tahun 2016, total anggaran belanja daerah untuk urusan kependudukan dan catatan sipil yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dalam APBD Kota

Jambi Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 8.021.363.929 untuk melaksanakan 27 kegiatan dalam 8 program. Realisasi keuangan untuk penyerapan anggaran belanja langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi pada tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 7.117.022.131 (88,73%) dari total target anggaran TA 2016 terdapat sisa dan efisiensi anggaran sebesar Rp. 904.341.798,- (11,27%).

Untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, telah dilakukan kerjasama dengan pihak kecamatan untuk melakukan rekam data dan up date data penduduk sesuai ketentuan untuk mendapatkan NIK dan KK, dengan menempatkan tenaga khusus untuk pendataan secara digital. Capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2016, sesuai jumlah penduduk Kota Jambi 775.427 Jiwa, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Jenis Dokumen kependudukan	2016
1	KTP/NIK	165.102
2	KK	700.250
3	Akta Kenal Lahir	15.422
4	Akta Kematian	932
5	Jumlah Penduduk	775.427

Peningkatan jumlah penduduk disebabkan urbanisasi dan kematian bayi yang sudah dapat dikendalikan. Secara umum tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan kependudukan dan catatan sipil yang menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi pada tahun anggaran 2016, hanya ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk kedepan antara lain :

1. Ketersediaan Blangko KTP - el.
2. Masih terdapatnya penduduk yang merekam data lebih dari 1 (satu) kali dan terdampak tidak bias diterbitkan KTP bersangkutan.
3. Lambatnya perekaman data terkirim ke data center di Jakarta.
4. Belum optimalnya pelaporan mengenai kelahiran dan kematian oleh RT maupun Kelurahan.

4.1.10. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan tugas dan tanggung jawab dari SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Jambi.

Adapun isu strategis yang berkaitan dengan masalah pokok di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Jambi adalah masih tingginya angka tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan terhadap anak, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, serta masih rendahnya persentase perempuan pada posisi eselon II dan III di lembaga pemerintahan. Tantangan tersebut harus ditangani secara efektif dan tepat sasaran dengan menetapkan program yang tepat pula.

Pemerintah Kota Jambi melalui visi dan misi Walikota Jambi, telah menetapkan misi “Mewujudkan masyarakat kota yang berakhlak, berbudaya dan berdaya saing”. Melalui misi tersebut, ditetapkan tujuan “peningkatan kesejahteraan keluarga dan pengarusutamaan gender di semua aspek pembangunan”. Sasaran dari tujuan ini adalah terwujudnya peningkatan peran serta perempuan dalam pemerintahan. Adapun strategi yang diterapkan untuk mewujudkan misi ini adalah, dengan upaya peningkatan peran perempuan di pemerintahan. Dengan adanya strategi tersebut, arah kebijakan yang ditempuh adalah dengan meningkatkan porsi perempuan dalam jabatan pemerintahan. Keseluruhan langkah strategis ini dicapai untuk mewujudkan Kota Jambi Bangkit Tahun 2016.

Pada tahun 2016, total anggaran belanja langsung daerah yang dialokasikan untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Jambi dalam APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 11.542.052.090 dan terealisasi sebesar Rp. 11.402.337.277 (97,13%).

Adapun pencapaian dan hasil yang telah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Jambi, sesuai dengan pencapaian target Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD Kota Jambi yang dicapai selama kurun waktu tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Kurun waktu 2016 telah ditangani 29 kasus pencabulan, 8 kasus penelantaran, 20 kasus KDRT.
- b. Berdasarkan hasil pendataan keluarga tingkat Kota Jambi tahun 2016, terdapat 130.572 rumah tangga, 130.570 Kepala keluarga dengan 501.572 jiwa, atau rata-rata jiwa dalam keluarga sebanyak 3,84 jiwa terdiri dari 271.609 jiwa laki-laki dan 282.931 jiwa perempuan.
- c. Dari 133.282 kepala keluarga yang ada di Kota Jambi, digolongkan kedalam 5 tahap keluarga, Pra Sejahtera 2.936, KS tahap I dan Sejahtera 127.634.

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Jambi pada tahun anggaran 2016.

4.1.11. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera merupakan tugas dan tanggung jawab dari SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Jambi

Adapun isu strategis yang berkaitan dengan masalah pokok di bidang pemberdayaan program Keluarga Berencana (KB) di Kota Jambi adalah masih tingginya angka kelahiran yang tidak terkontrol, implikasi dari fenomena ini adalah masih tingginya jumlah tindak KDRT dan anak, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Tantangan tersebut harus ditangani secara efektif dan tepat sasaran dengan menetapkan program yang tepat pula.

Pada tahun 2016, total anggaran belanja daerah untuk urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Jambi dalam APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 4.869.861.000 terealisasi sebesar Rp. 4.730.146.187 (97,13%).

Adapun pencapaian dan hasil yang telah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Jambi, sesuai dengan pencapaian target Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD Kota Jambi yang dicapai selama kurun waktu tahun 2016 adalah Pelayanan peserta KB baru dengan total 1.079 akseptor (1,057% dari PPM), pelayanan KB Pria sebanyak 0, kegagalan akseptor IUD sebanyak 6 kasus (1,26% dari peserta KB aktif) dan telah ditangani secara medis. Tidak ada kasus komplikasi alat kontrasepsi.

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Jambi pada tahun anggaran 2016.

4.1.12. URUSAN SOSIAL

Urusan Sosial yang merupakan urusan wajib dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kota Jambi. Pada tahun 2016, total anggaran belanja langsung untuk urusan sosial adalah sebesar Rp. 4.686.866.000,- dengan realisasi

keuangan yang dapat direalisasikan dari belanja langsung urusan sosial tersebut adalah sebesar Rp. 4.492.694.538,- atau sebesar 99,49 % untuk melaksanakan 7 Program dan 35 kegiatan.

Sesuai dengan target indikator kinerja urusan sosial pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018, dengan sasaran terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanganan PMKS, pada tahun 2016 ditargetkan indikator kinerja dengan rasio peningkatan jumlah PMKS yang dilayani per tahun sebesar 36% dari total target selama 5 tahun sebesar 7.543 PMKS. Realisasi yang diperoleh selama kurun waktu tahun 2016 adalah sebesar 70,00 % atau 10.317 PMKS. Angka tersebut menggambarkan bahwa, pada tahun 2016 realisasi indikator kinerja yang ditargetkan pada RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018 melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2016.

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan sosial.

4.1.13. URUSAN KETENAGAKERJAAN

Urusan ketenagakerjaan merupakan urusan yang menjadi tanggung jawab dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi. Pada tahun 2016, total anggaran belanja langsung untuk Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi dalam APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2016 untuk urusan ketenagakerjaan adalah sebesar Rp. 1.196.733.000,- untuk melaksanakan 1 (satu) Program dan 5 (lima) kegiatan. Realisasi keuangan yang dapat direalisasikan dari belanja langsung urusan sosial tersebut adalah sebesar Rp. 1.099.992.900,- (91.92%).

Sesuai dengan target indikator kinerja urusan ketenagakerjaan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018, dengan sasaran terciptanya lapangan pekerjaan, pada tahun 2016 ditargetkan indikator kinerja jumlah angkatan jumlah kerja terdaftar yang terserap sebesar 20% dari total target selama 5 tahun sebesar 5.903 angkatan kerja. Realisasi yang diperoleh selama kurun waktu tahun 2016 adalah sebesar 37.90 % atau 2.237 angkatan kerja. Angka tersebut menggambarkan bahwa, pada tahun 2016 realisasi indikator kinerja yang ditargetkan pada RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018 melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2016.

Sasaran kedua adalah tersedianya tenaga kerja lokal yang berdaya saing, pada tahun 2016 ditargetkan indikator kinerja Jumlah serapan tenaga kerja pada UMKM sebesar 3% dari total target selama 5 tahun sebesar 16.202 tenaga kerja. Realisasi yang diperoleh selama kurun waktu tahun 2016 adalah sebesar 10.28% atau 1.665 tenaga kerja. Angka tersebut menggambarkan bahwa, pada tahun 2016 realisasi indikator kinerja yang ditargetkan pada RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018 melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2016.

Adapun hasil dan prestasi yang telah dicapai selama kurun waktu tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Mempertahankan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 untuk kegiatan Pelayanan Penerbitan Kartu Pencari Kerja AK-1 dari Transpacific.
2. Memperoleh Penghargaan Produktivitas (SIDDHAKARYA) dari Bapak Gubernur Jambi sebagai Pembina Pemenang Terbaik II (kedua) untuk Penilaian Kualitas dan Produktivitas Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2016 Kategori : Usaha Menengah.
3. Memperoleh Penghargaan sebagai Pembina Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perusahaan di Kota Jambi Tahun 2016 dari Menteri Ketenagakerjaan RI kepada Bapak Walikota Jambi
4. Penghargaan dari Bapak Walikota Jambi kepada Perusahaan yang telah melaksanakan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan *Zero Accident* yaitu:
 - PT. Indofood CBP Sukses Makmur Cab.Jambi
 - PT. Pertamina UEP Jambi
 - PT. Transportasi Gas Indonesia Regional Office I
 - PT. Transportasi Gas Indonesia GTM
 - PT. Djambi Waras
 - PT. Eramas Persada Energy Jambi
 - PT. Bumi Jambi
 - PT. Energasindo Heksa Karya

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan ketenagakerjaan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi pada tahun anggaran 2016.

4.1.14. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Penyelenggaraan urusan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah merupakan urusan wajib yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam RPJMD 2013-2018 pada misi 2 tentang arah kebijakan yang berisikan untuk mendorong dan meningkatkan tumbuh kembangnya wirausaha baru. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengembangkan Koperasi dan UMKM.

Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah saat ini lebih mengarah pada upaya penciptaan kemandirian, partisipasi, daya inovasi dan kreativitas pelaku Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai motivator dan fasilitator

yang tujuannya adalah mencapai kemandirian, kematangan dan kedewasaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin kompleks.

Pada tahun 2016 Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi menganggarkan dana sebesar Rp. 4.691.000.000,- dengan realisasi Rp. 4.421.010.926,- atau 94,23%. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun ini antara lain pembinaan, pelatihan, penyuluhan, serta pengawasan terhadap Koperasi dan pemberian bantuan pada pelaku UMKM juga mempromosikan berbagai macam hasil produk-produk UMKM ke luar daerah melalui pameran-pameran.

Target yang ditetapkan untuk koperasi aktif dan UMKM mandiri masing-masing 5 unit sesuai dengan target RPJMD Kota Jambi, sampai dengan tahun 2016 jumlah koperasi aktif sebanyak 208 unit dan UMKM mandiri 155 unit.

Prestasi yang telah dicapai Kota Jambi tahun 2016 adalah :

1. Satya Lencana Pembangunan Bidang Koperasi dan UMKM dari Presiden RI yang diserahkan pada Hari Koperasi ke 69 di Provinsi Jambi.
2. Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional yang diberikan pada KOPKAR PTPN VI untuk jenis koperasi jasa oleh Menteri Koperasi dan UKM RI.

4.1.15. URUSAN PENANAMAN MODAL

Urusan Penanaman Modal merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Jambi seiring dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi. Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal ditujukan untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investor dalam pengembangan usaha di Kota Jambi.

Anggaran yang dialokasikan untuk urusan Penanaman Modal pada tahun 2016 Belanja Langsung sebesar Rp. 4.022.250.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.746.638.633,- atau 93,15% dan realisasi fisik sebesar 98,82%. Pada tahun 2016, untuk menyelenggarakan Urusan Penanaman Modal dijabarkan kedalam 9 program dengan 33 kegiatan. Adapun pencapaian beberapa program dan kegiatan pada tahun 2016 diantaranya adalah:

1. Realisasi Investasi PMDN melalui Izin Prinsip Penanaman Modal sampai dengan bulan Desember tahun 2016 sebesar Rp. 2.104.401.841.760,-
2. Penerbitan 11.265 izin baru dan sebanyak 14.543 izin yang diregistrasi (Daftar Ulang).

3. Melaksanakan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan metode survey kemasyarakatan melalui 9 unsur pelayanan, pada tahun 2016 dapat dikonversi dengan angka IKM 81,08% dengan mutu pelayanan pada kategori *BAIK*.
4. Selama tahun 2016, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Jambi telah mengikuti Promosi Investasi sebanyak 3 kali. Promosi ini bertujuan mengenalkan kepada calon investor dalam dan luar negeri tentang potensi-potensi investasi yang ada di Kota Jambi dengan harapan dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kota Jambi.
5. Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah yang bertujuan mensinergikan antara aktivitas pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan investasi serta memberikan multi player effect positif bagi perekonomian Daerah.

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh Urusan Penanaman Modal adalah peningkatan realisasi investasi dan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Adapun pencapaian realisasi investasi Kota Jambi pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.104.401.841.760,- Untuk pencapaian IKM pada tahun 2016 ditargetkan dengan status “BAIK”, dimana IKM pada tahun 2016 menghasilkan angka 81,08% yang berarti “BAIK”. Dengan demikian target IKM pada tahun 2016 tercapai dengan angka yang memuaskan.

Adapun keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2016, BPMPT telah mengembangkan sistem Pelayanan Perizinan Online secara bertahap dengan bentuk online melalui website yang sudah diluncurkan pada tanggal 27 Desember 2016 oleh Walikota Jambi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Penanaman Modal adalah BPMPT belum mendapatkan pelimpahan kewenangan dalam penandatanganan Izin Prinsip Penanaman Modal yang berdampak pada Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) belum bisa diterapkan secara optimal. Masih belum optimalnya sosialisasi peraturan tentang penanaman modal, khususnya mengenai kewajiban bagi setiap investor untuk memiliki izin prinsip penanaman modal sebelum memulai kegiatan investasi ataupun mengembangkan investasi yang sudah dilaksanakan, investor belum mengirimkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala.

4.1.16. URUSAN KEBUDAYAAN

Urusan kebudayaan merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kota Jambi. Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan ditujukan untuk melestarikan nilai-nilai budaya dengan cara pembinaan sanggar-

sanggar seni dan pelestarian cagar budaya di Kota Jambi. Peningkatan sarana dan prasarana seni dan budaya serta pelaksanaannya dan mengikuti even-even seni budaya didalam maupun diluar daerah .

Anggaran yang dialokasikan untuk urusan Kebudayaan pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.180.585.000.- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 999.534.150,- atau 84,66%, dan realisasi fisik sebesar 89,48%. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana terutama kegiatan pementasan diluar daerah. Untuk menyelenggarakan urusan kebudayaan dijabarkan kedalam satu program dengan 2 Kegiatan. Adapun pencapaian beberapa kegiatan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Bulan Promosi Pemerintah Kota Jambi di TMII Jakarta
- b. Lomba Lagu Mars dan Hymne Kota Jambi
- c. Apresiasi Seni dan Budaya
- d. Rahap Makam
- e. Festival DanauTeluk
- f. Festival Batang Hari
- g. Pemugaran Makam Prabu Suta Wijaya

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh Urusan Kebudayaan adalah peningkatan jumlah sarana dan prasarana olahraga, seni dan budaya serta terselenggaranya event berskala nasional/internasional. Pencapaian IKU jumlah sarana dan prasarana seni dan budaya tahun 2016 ditargetkan menjadi 40% dari kondisi awal sebesar 10% (tahun 2013). Urusan kebudayaan pada tahun 2016 telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan target IKU tersebut, diantaranya adalah Pemugaran Makam Suta Wijoyo yang berguna untuk pengetahuan sejarah dan kebudayaan bagi para pelajar dan masyarakat. Selanjutnya untuk peningkatan sarana dan prasarana seni dan budaya belum dilakukan secara maksimal dikarenakan keterbatasan dana yang tersedia, dengan demikian target IKU pada tahun 2016 tersebut belum tercapai.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Kebudayaan adalah keterbatasan dana yang tersedia, sehingga minimnya peningkatan jumlah sarana dan prasarana budaya. Terkait hal tersebut akan terus diusahakan untuk mengajukan anggaran ke pemerintah pusat dan juga ke Pemerintah Provinsi Jambi.

4.1.17. URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Urusan Pemuda dan Olahraga merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kota Jambi. Penyelenggaraan urusan Pemuda dan Olahraga ditujukan untuk meningkatkan peran Pemuda dan Olahraga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan upaya memberikan kesempatan kepada pemuda untuk berkeaktifitas, pengembangan jiwa kewirausahaan pemuda, peningkatan sarana dan

prasarana olahraga dan pelaksanaan event-event pertandingan serta pencarian atlet-atlet berprestasi dan pembinaannya. Anggaran yang dialokasikan untuk urusan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.469.956.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 82,84% dan realisasi fisik sebesar 100%. Pencapaian realisasi penyerapan anggaran sebesar 82,84% dikarenakan penyerapan yang tidak maksimal pada Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga. Pada tahun 2016, untuk menyelenggarakan urusan Pemuda dan Olahraga dijabarkan ke dalam 1 program dengan 5 kegiatan. Adapun pencapaian beberapa prestasi pada tahun 2016 diantaranya adalah Juara II Napak Tilas di Merangin Tahun 2016, Pengiriman BPAP ke Tingkat Nasional 5 orang ke Kalimantan, Pengiriman PASKIBRAKA ke Tingkat Provinsi 10 orang, Juara Umum PORPROV Jambi di Batanghari dan Juara II Pekan Paralimpic Tahun 2016 Tingkat Provinsi di Jambi

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013 – 2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh urusan Pemuda dan Olahraga adalah peningkatan jumlah sarana dan prasarana olahraga, seni dan budaya serta terselenggaranya event berskala nasional/internasional. Pencapaian IKU pada tahun 2016 ditargetkan meningkat menjadi 30% dari target tahun 2015 sebesar 20%. Urusan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2015 telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target IKU tersebut, diantaranya adalah pengadaan dayung dragon boat race serta pelaksanaan tinju amatir Piala Wakil Presiden dan Piala Walikota Jambi. Walau telah melakukan berbagai upaya, namun IKU tersebut pada tahun 2016 belum tercapai terutama dari sisi peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pemuda dan Olahraga adalah keterbatasan dana yang tersedia, sehingga menyebabkan minimnya peningkatan jumlah sarana dan prasarana olahraga.

Prestasi Yang Pernah di raih tahun 2016 :

1. Juara II Napak Tilas di Merangin Tahun 2016.
2. Pengiriman BPAP ke Tingkat Nasional 5 orang ke Kalimantan Tahun 2016.
3. Pengiriman PASKIBRAKA ke Tingkat Provinsi 10 orang Tahun 2016.
4. Juara Umum PORPROV Jambi di Batanghari Tahun 2016
5. Juara II Pekan Paralimpic Tahun 2016 Tingkat Provinsi di Jambi.

4.1.18. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “mewujudkan masyarakat kota yang berakhlak, berbudaya dan berdaya saing” yang merupakan Misi yang ke-3

dari RPJMD Kota Jambi guna mendukung visi Kota Jambi yaitu "mewujudkan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis masyarakat yang berakhlak dan berbudaya. Urusan ini pada tahun 2016 dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan misi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2016 memiliki 2 (dua) program urusan yang terdiri atas 7 kegiatan, didukung dengan 2 (dua) program urusan dari Satuan Polisi Pamong Praja yang terbagi dalam 5 kegiatan.

Dana yang dialokasikan untuk melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri pada tahun 2016 berjumlah Rp. 2.835.645.850,- untuk SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan realisasi keuangan sebesar 94,46% atau Rp. 2.678.455.106,- dan realisasi fisik sebesar 100%, sedangkan untuk Satuan Polisi Pamong Praja sebesar jumlah anggarannya sebanyak Rp. 8.048.300.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 85,98 % atau Rp. 6.919.642.504,- dan realisasi fisik sebesar 100 %. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut tidak ditemui permasalahan yang signifikan.

Didalam melaksanakan 4 (empat) program pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri ini, kedua SKPD mengacu kepada pemenuhan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD pada misi ke - 3 (tiga) yaitu, persentase penyelesaian permasalahan keagamaan. Pada tahun 2016 target penyelesaian konflik adalah 100%, yang berarti semua konflik yang terjadi pada tahun 2016, dapat diselesaikan dengan baik. Untuk mencapai target tersebut, dilaksanakan beberapa kegiatan dan program, diantaranya program pengembangan wawasan kebangsaan, program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dan seterusnya. Selain itu, dari masing - masing SKPD juga memiliki Indikator Kinerja Kunci yang mendukung tercapainya ketertiban kerukunan beragama, yang pencapaiannya juga difasilitasi didalam program dan kegiatan di kedua SKPD tersebut.

4.1.19. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH

Urusan Otonomi daerah, pemerintah umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, dilaksanakan oleh beberapa SKPD, yaitu, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Bagian di Sekretariat Kota Jambi dan 11 (sebelas) kecamatan di Kota Jambi.

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Jambi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang pendapatan dan tugas pembantuan dengan melakukan perencanaan, pembinaan dan pengendalian sumber-sumber

pendapatan daerah yang meliputi Pendataan, Penetapan, Penagihan, Perencanaan dan Pelaporan, Pengendalian dan Penyuluhan, Ketatausahaan/Kesekretariatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pada tahun 2016 Dispenda mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 6.634.040.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.528.925.213,- atau 83,3% dan realisasi fisik sebesar 95,30%. Pada tahun 2016 Dispenda melaksanakan 6 program rutin (23 kegiatan) dan 1 program urusan (7 kegiatan). Adapun pencapaian beberapa program dan kegiatan pada tahun 2016 diantaranya adalah:

a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan/Penerimaan Daerah

- Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat.
- Kebijakan insentif.
- Updating basis data pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan.
- Melakukan evaluasi dan pengkajian perkembangan Pajak Daerah guna mendapatkan data potensi dari obyek Pajak Daerah.
- Mengoptimalkan pelaksanaan pendataan melalui survey lapangan terhadap perkembangan/perubahan data objek pajak, dengan melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan wajib pajak seperti tutup usaha, perubahan tempat, ukuran dan lain sebagainya.
- Melakukan pengkajian Peraturan-peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sesuai Undang-undang yang berlaku.

b. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Dispenda Kota Jambi pada tahun 2016 sebesar Rp. 187.336.000.000,-. Realisasi penerimaan yang dapat dicapai adalah sebesar Rp. 160.582.009.507,89 atau 85,72%. Dengan demikian pada tahun 2016 mengalami penurunan penerimaan sebesar Rp. 26.753.990.492.11,- atau sebesar 14,28% .

Sedangkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Jambi Tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 18.179.644.803,- atau 60,60%.

Permasalahan/kendala yang dihadapi Dispenda Kota Jambi dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Daerah, yaitu :

1. Persepsi Wajib Pajak terhadap penggunaan uang pajak.
2. Kurangnya SDM berkualitas yang memahami masalah perpajakan.
3. Penegakan hukum (*Low Inforcement*) yang lemah.
4. Data Base Pajak belum berbasis komputerisasi.
5. Kurangnya Intensitas koordinasi antar Instansi terkait.

6. Legalitas usaha yang menjadi dasar pengukuhan wajib pajak.
7. Sarana dan prasarana belum optimal.
8. Tingkat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak (WP) masih rendah.
9. Penerapan sanksi bagi wajib pajak (WP) yang nakal belum tegas.
10. Sistem perpajakan daerah masih bersifat manual (belum computerized)

Upaya yang dilaksanakan Dispenda Kota Jambi dalam mengatasi permasalahan yang ada antara lain :

- 1) Peningkatan kemampuan SDM aparatur dengan mengikutsertakan pegawai Dinas Pendapatan Kota Jambi untuk mengikuti Diklat / Bimbingan Teknis yang berkaitan dengan masalah perpajakan.
- 2) Pelaksanaan Sosialisasi tentang Pajak Daerah kepada WP/WR agar dapat ditingkatkan secara optimal.
- 3) Peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana dengan mengajukan usulan penambahan anggaran kepada TAPD dalam rangka menunjang kegiatan operasional Dinas.
- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak (WP) melalui kegiatan sosialisasi/ penyuluhan.
- 5) Peninjauan kembali/merevisi Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota (Perwal) tentang Pajak Daerah yang disesuaikan dengan kondisi fiskal keuangan maupun kondisi pertumbuhan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
- 6) Melaksanakan *system computerized* pajak daerah.

Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta tugas pembantuan.

Pada tahun 2016 DPKAD mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 6.704.684.203,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 6.180.038.969,- atau 92,2% dan realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2016 DPKAD melaksanakan 6 program rutin (21 kegiatan) dan 1 program urusan (19 kegiatan). Pada tahun 2016 target kontribusi yang diberikan dari pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah sebesar Rp. 316.463.773.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 287.551.400.033,49,- dengan persentase sebesar 90,86%.

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh DPKAD Kota Jambi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian IKU tersebut pada tahun 2016 menunggu hasil audit oleh BPK, sedangkan pada tahun 2015 pencapaian IKU belum menghasilkan WTP. Progres capaian yang diperoleh sampai saat ini

adalah 75% dengan upaya yang telah dilakukan berupa penatausahaan aset dengan menggunakan sistem/aplikasi yang terintegritas dengan sistem/aplikasi keuangan dan juga menginventarisir selisih seluruh data barang milik daerah dengan neraca secara komprehensif yang melibatkan seluruh elemen dan unsur terkait.

Untuk mencapai misi ke-4 (empat) dari RPJMD Kota Jambi, didalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan bersih (*Clean Government*), maka pemerintah Kota Jambi melalui BKD sebagai pelaksana kegiatan, telah membuat Indikator Kinerja Utama didalam pencapaian misi tersebut, yaitu Rasio jabatan terhadap Pendidikan dan Keahlian. Target RPMJD untuk indikator ini pada tahun 2016 adalah sebesar 75%, dengan jumlah pegawai negeri sipil 6.886 orang, dimana 55,98% didominasi dengan tamatan S1, diikuti 23,17% tamatan SD-SMA, tamatan D1-D3 sebesar 15,03% dan hanya 0.11% S3 serta 4,69% S2, maka pemerintah kota Jambi didalam mencapai target indikator kinerja utama tersebut, pada tahun 2016 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 5.846.500.000,- untuk melaksanakan program pendidikan kedinasan, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dan program pembinaan dan pengembangan aparatur. Realisasi keuangan sebesar 68.55% (Rp. 4.007.714.977) dan 91.86% realisasi fisik.

Dengan program-program yang telah dilaksanakan, maka pencapaian indikator kinerja utama didalam penempatan aparatur sesuai dengan bidang pendidikan, dan keahlian sesuai dengan IKU RPJMD adalah sebesar 93.32% telah melampaui dari target yang telah ditentukan oleh RPMJD yaitu 75%. Pada Tahun 2016 Pemerintah Kota Jambi telah berkoordinasi dengan Diklat Propinsi untuk mengirim peserta diklat struktural (PIM 3 dan PIM 4) dan mempersiapkan kontribusi sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh Propinsi Jambi dan mengirim peserta diklat PIM 2 sesuai yang telah di jadwalkan oleh pemerintah pusat.

Pada tahun 2016 di Inspektorat Kota Jambi terdapat 8 (delapan) program dan 29 kegiatan, diantaranya program peningkatan sistem pengawasan, pembinaan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Adapun anggaran yang dialokasikan untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 sebesar Rp. 3.744.700.000,- dan penyerapan dana sebesar 88.73% atau sebesar Rp. 3.322.525.295,- dan realisasi fisik sebesar 100%. Permasalahan yang ditemui dilapangan yang dapat menghambat pencapaian target WTP, diantaranya masih bermasalahnya penataan aset di beberapa SKPD di Kota Jambi.

Selanjutnya untuk melaksanakan urusan Urusan Otonomi daerah, pemerintah umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, khususnya pemerintah umum dan perangkat daerah, Sekretariat DPRD, pada tahun 2016 ini melaksanakan 8 (delapan) program, dua program penunjang pelayanan administrasi DPRD dan 6 (enam) program rutin lainnya. Anggaran yang dialokasikan untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun

2016 sebesar Rp. 22.371.462.000 dengan total realisasi keuangan sebesar Rp. 18.146.994.116 (81,12%) dan realisasi fisik sebesar 92,9% Adapun program yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan meningkatkan kapasitas aparatur sekretariat dan anggota DPRD dan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD yang bertujuan terselenggaranya penerimaan tamu DPRD dan terwujudnya komunikasi dan koordinasi dengan lembaga negara lain. Secara umum tidak terdapat permasalahan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat Dewan hanya pada kegiatan Reses dan Kunjungan Kerja untuk tahun 2016 ini tidak dapat dilaksanakan karena belum jelasnya untuk peraturan pelaksanaan kegiatan reses perorangan

Didalam pelaksanaan urusan Otonomi daerah ini, Pemerintah Kota Jambi melalui kecamatan-kecamatan melaksanakan program pemberdayaan kecamatan dengan kegiatan Bangun Kecamatan Secara Intensif dan Terpadu dengan Berazaskan Swadaya, program ini bertujuan mempercepat pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan Kota Jambi melalui bantuan pemberian bahan material/bangunan pada masyarakat dengan menitik beratkan pada semangat kegotong royongan masyarakat. kegiatan koordinasi pengelola kebersihan lingkungan di wilayah kecamatan dan kegiatan pembinaan Administrasi Pemerintah Kelurahan, kegiatan peningkatan kualitas pelayanan kecamatan serta kegiatan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan. Pada tahun 2016, terdapat beberapa prestasi tingkat lokal dan nasional yang telah di raih oleh kecamatan-kecamatan, diantaranya Juara I Hatinya PKK Tingkat Nasional, Juara Harapan Kader BKB Tingkat Nasional, Lomba Kelompok BKB Tingkat Provinsi, Juara I Lomba BBGRM Tingkat Provinsi, Juara I BKL Tingkat Provinsi, Juara I Lomba UKS Tingkat Provinsi, Lomba Juara I Lomba Pemanfaatan Toga Tingkat Provinsi dan Lomba Posyandu Juara II Tingkat Provinsi.

4.1.20. URUSAN KETAHANAN PANGAN

Pembangunan Ketahanan Pangan dan Pertanian masih merupakan prioritas Pembangunan Daerah kota jambi yang di fokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan dan konsumsi pangan dan percepatan penganekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat petani.

Dalam menyelenggarakan urusan ketahanan pangan, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.397.521.000,- yang dijabarkan pada 1 program dan 9 kegiatan. Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 4.145.334.630,- atau 94,27% dan realisasi fisik kegiatan 100%.

Upaya yang telah dilaksanakan BKPP pada tahun 2016 antara lain :

1. Terlaksananya Gerakan makan bergizi berimbang, pengujian sampel produk pangan, pengadaan alat labor uji sampel prima 3 dan sosialisasi keamanan pangan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
2. Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan pekarangan dan pembentukan POKJA untuk penganeekaragaman konsumsi pangan, yang dikarenakan masih rendahnya konsumsi pangan sumber karbohidrat selain beras, serta terlaksananya sosialisasi keamanan pangan.
3. Terlaksananya pembinaan desa mandiri pangan di 12 (dua belas) Kelurahan dalam Kota Jambi.
4. Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebanyak 15.000 Kg untuk lokasi pasca bencana alam dan keadaan darurat.
5. Terlaksananya penilaian kemampuan kelas kelompok tani, Pelatihan petani di BPP, terlaksananya rebug KTNA dan terlaksananya peringatan HKP/PEDA, serta penyuluh dan pendamping bagi pertanian/perkebunan.

Prestasi yang diperoleh pada tahun 2016 adalah Juara I Kategori Cita rasa untuk B2SA Lomba Cipta Menu Tingkat Nasional Tahun 2016, Juara I Apresiasi Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Tingkat Provinsi Jambi serta mendapatkan penghargaan Tingkat Nasional untuk kategori pelaku ketahanan pangan atas nama Abriyanto Kecamatan Pelayangan yang diserahkan langsung oleh Presiden RI, dan Juara II Apresiasi Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Tingkat Provinsi Jambi untuk kategori Pengolahan Pangan atas nama Kelompok Amanah.

4.1.21. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Urusan pemberdayaan masyarakat desa merupakan urusan wajib yang menjadi tanggung jawab dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Jambi.

Pemerintah Kota Jambi melalui visi dan misi Walikota Jambi, telah menetapkan misi "Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Dalam Bingkai Kearifan Lokal". Melalui misi tersebut, ditetapkan tujuan "Peningkatan peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dengan mengembangkan seni, budaya serta memperhatikan kearifan lokal". Sasaran dari tujuan ini adalah, terwujudnya peran masyarakat dalam pembangunan Kota Jambi. Adapun strategi yang diterapkan untuk mewujudkan misi ini adalah dengan upaya peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Keseluruhan langkah strategis ini dicapai untuk mewujudkan Kota Jambi Bangkit Tahun 2018.

Pada tahun 2016, total anggaran belanja langsung untuk Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Jambi dalam APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 9.305.943.000,- untuk melaksanakan 8 (Delapan) Program dan 31 (Tiga Puluh Satu) kegiatan.

Realisasi keuangan yang dapat direalisasikan dari belanja langsung Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Jambi adalah sebesar Rp. 9.113.130.095,- (97,93%).

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan pemberdayaan masyarakat desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Jambi pada tahun anggaran 2016.

4.1.22. URUSAN KEARSIPAN

Urusan kearsipan merupakan urusan wajib yang menjadi tanggung jawab SKPD Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi.

Kearsipan dan dokumentasi merupakan salah satu sasaran strategis pemerintah Kota Jambi dalam menyusun rencana pembangunan bidang kearsipan yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Jambi tahun 2013 -2018, yaitu dalam rangka misi “Mewujudkan Masyarakat Kota Jambi yang Berahklak, Berbudaya dan Berdaya Saing”. Dengan tujuan “Meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat Kota Jambi melalui pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata”. Strategi yang dicapai untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan meningkatkan mutu dan akses pendidikan, yaitu dengan arah kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.

Alokasi anggaran belanja langsung yang menjadi urusan kearsipan pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Jambi untuk Tahun Anggaran 2016 yang tertuang di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi adalah sebesar Rp. 268.976.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar 245.130.000 (91,13 %)

Dialokasikan untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan di bidang Kearsipan dan Dokumentasi.

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan kearsipan pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Jambi pada tahun anggaran 2016.

4.1.23. URUSAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Urusan Informasi dan Komunikasi diselenggarakan oleh 2 (dua) SKPD, yaitu Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kota Jambi. Pada tahun 2016, dana yang dialokasikan untuk mewujudkan pemerintahan yang professional dan

bersih (clean governance), sesuai dengan misi ke-4 RPJMD Kota Jambi adalah sebesar Rp. 4.412.432.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.081.547.820,- atau 92,50% yang dilaksanakan melalui 1 program dan 2 kegiatan di Bagian Humas Setda dan Rp. 1.781.735.000,- untuk 2 program 3 kegiatan di KPDE Kota Jambi. Dari dana yang tersedia untuk penyelenggaraan Urusan Informasi dan Komunikasi terealisasi sebesar 82,21% dengan realisasi fisik mencapai 87,49% yang dilaksanakan oleh Bagian Humas Setda Kota Jambi dan untuk KPDE Kota Jambi terealisasi sebesar 79,85 % dengan realisasi fisik sejumlah 89,75 %.

Guna mewujudkan misi Pemerintahan yang Profesional dan Bersih, pemerintah kota Jambi melakukan peningkatan jaringan komunikasi dan informatika yang terintegrasi, melaksanakan diseminasi informasi yang efektif dan pengelolaan data secara elektronik untuk menjadikan Jambi sebagai Kota Pintar (Smart City).

Dalam penyelenggaraan urusan Informasi dan Komunikasi masih terdapat kendala yaitu terbatasnya Sumber Daya Aparatur yang menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi serta alokasi anggaran yang terbatas untuk urusan ini, karena distribusi belanja langsung lebih diprioritaskan pada program dan kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

4.1.24. URUSAN PERPUSTAKAAN

Urusan perpustakaan merupakan urusan wajib yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari SKPD Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Jambi.

Pendidikan dan dunia perpustakaan merupakan sasaran strategis Pemerintah Kota Jambi dalam menyusun rencana pembangunan bidang pendidikan yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Jambi tahun 2013-2018, yaitu dalam rangka misi “Mewujudkan Masyarakat Kota Jambi yang Berakhlak, Berbudaya dan Berdaya Saing”, dengan tujuan “Meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat Kota Jambi melalui pendidikan yang unggul, terjangkau, dan merata”. Strategi yang dicapai untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan meningkatkan mutu dan akses pendidikan, yaitu dengan arah kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.

Alokasi anggaran belanja langsung untuk urusan perpustakaan pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Jambi untuk tahun anggaran 2016 yang tertuang di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi adalah sebesar Rp. 1.111.770.100,- dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp 935.329.275 atau 84,13 % untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan di bidang Perpustakaan.

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan perpustakaan pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Jambi pada tahun anggaran 2016 hanya ada kelebihan anggaran di bidang Pengembangan Minat Baca dan Budaya Baca yang dialokasikan ke Program lain.

4.2. URUSAN PILIHAN

4.2.1. URUSAN PERTANIAN

Dalam rangka mewujudkan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa selaras dengan Misi Kota Jambi dalam meningkatkan perekonomian kota berbasis potensi lokal menuju kemandirian daerah, sektor pertanian yang meliputi sub sektor tanaman pangan dan hortikultura berupaya untuk meningkatkan ekonomi dan pendapatan petani yang ada di Kota Jambi dengan berbagai program dan kegiatan baik dari APBD II, APBD I dan APBN baik berupa bantuan benih, pupuk, jaringan irigasi, alat dan mesin pertanian, saprodi lainnya.

Pada tahun 2016, alokasi dana bidang tanaman pangan dan hortikultura sebesar Rp.4.041.926.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.920.511.196,-. Upaya yang dilaksanakan pada tahun 2016 antara lain :

1. Kegiatan Tanaman Pangan khususnya komoditi padi dan palawija pada tahun 2016 adalah pengembangan padi sawah dan memberikan bantuan kepada masyarakat petani yakni benih padi sawah sebanyak 14.500 kg untuk lahan sawah seluas 725 Ha. Disamping itu juga dibantu sarana produksi pertanian (saprodi) bagi petani penangkar padi sawah berupa benih, pupuk dan pestisida untuk lahan sawah seluas 6 Ha. Target tanam padi yang ditetapkan oleh Kementrian Pertanian Republik Indonesia untuk Kota Jambi sebesar 1.700 Ha hanya terpenuhi 944 Ha (55,53%), dari luas tanam tersebut yang bisa dipanen hanya seluas 395 Ha, kondisi tersebut disebabkan oleh kemarau dan kabut asap serta selebihnya mengalami puso sebesar 569 Ha. Disamping bantuan yang bersumber dari APBD Kota Jambi ada juga bantuan dari APBD Provinsi Jambi berupa bantuan benih padi sawah untuk kawasan pangan terpadu seluas 250 Ha dan pengembangan jagung hibrida seluas 10 Ha, namun bantuan ini juga mengalami kondisi kekeringan dan puso.
2. Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian mendukung Tanaman Pangan khususnya komoditi padi berupa bantuan baki semai sebanyak 810 unit yang merupakan teknologi tepat guna untuk luas lahan 10 Ha/musim tanam. Selanjutnya untuk menghindari kehilangan hasil, akibat burung pemakan padi saat padi telah berisi, diberi bantuan jaring padi sebanyak 500 gulung untuk luas lahan sekitar 10 Ha/musin tanam. Melalui dana APBN diberi bantuan kepada kelompok tani untuk kegiatan Pengembangan optimalisasi lahan sawah seluas 200 Ha dan Pengembangan jaringan irigasi seluas 100 Ha, yakni untuk mendukung upaya khusus

peningkatan produksi padi, jagung dan kedele. Disamping itu, juga diberikan bantuan alat dan mesin pertanian berupa Handtraktor 10 unit, pompa air 3 unit, minitraktor 1 unit dan bangunan serta penggilingan padi 1 unit.

3. Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian mendukung Tanaman Pangan berupa bantuan kendaraan roda 3 dan perlengkapan sebanyak 4 unit yang dimanfaatkan untuk alat angkut saprodi dan pemasaran produk pertanian dan pemasaran produksi pertanian. Dengan cara pemasaran secara langsung dari petani ke konsumen dapat memutus mata rantai pemasaran sekitar 20% sehingga keuntungan petani menjadi meningkat, selanjutnya bantuan alat penggilinging/juicer sebanyak 2 unit untuk pengolahan hasil pertanian
4. Kegiatan Hortikultura Aneka Tanaman pada optimalisasi pemanfaatan pekarangan diberikan bantuan berupa bibit dalam polybag yang diserahkan pada P2WKSS, HATINYA PKK, PHBS dan Kampung Bantar, yakni berupa tanaman cabe sebanyak 3.170 polybag, tanaman terong sebanyak 1.450 polybag, tanaman kembang kol 1.000 polybag serta toga 2.100 polybag. Disamping itu juga, kegiatan Pengembangan Kawasan Hortikultura diserahkan bantuan benih sayuran buah sebanyak 650 bungkus dan benih seeding net 1 unit dan tanaman florikultura (hias) juga dikembangkan tanaman anggrek 350 pot. Pada tahun 2016 ini melalui dana APBD kegiatan Hortikultura dan Aneka Tanaman ada pengembangan komoditi cabe seluas 14 Ha. Jenis bantuan yang diberikan berupa bibit cabe dengan jenis Castillo F1 dan TM 999 dan untuk mendukung kegiatan ini diberi juga Sarana Produksi berupa Pupuk Tricokhompos, Pupuk NPK, Mulsa dan Agens Hayati. Disamping pengembangan cabe melalui dana APBD juga dibantu tanaman anggrek dan melati seluas 8.000 M2. Pada tahun 2016 ini dikarenakan kemarau yang panjang dan kabut asap, sehingga untuk capaian luas tanan, panen, produktifitas dan produksi tidak dapat tercapai.
5. Kegiatan Pengembangan bibit Unggul pertanian/perkebunan pada tahun 2016 adalah penyediaan calon induk dan perbanyak bibit/benih hortikultura yang difokuskan pada perbanyak penyediaan bibit tersebut pada awalnya dapat dilaksanakan 100% dari target yang telah ditentukan, namun akibat dari kemarau pada bulan Agustus-November 2016, maka bibit yang tersisa mengalami kematian sekitar 50% yang disebabkan oleh kekeringan.

Untuk pengembangan calon pohon induk yang telah mengalami kenaikan, dimana calon pohon induk buah-buahan yang diadakan pada tahun 2016 diantaranya tanaman jeruk 100 batang (BPMT), durian 50 batang, alpukat 20 batang, sirsak ratu 50 batang, mangga 10 batang, manggis 5 batang dan tanaman koleksi jeruk keprok siam 100 batang, keprok pontianak 100 batang yang kesemuanya telah ditanam pada lahan UPTD Balai Benih Hortikultura Mayang.

Bidang Peternakan

Pembangunan Pertanian dibidang Peternakan bertujuan untuk Peningkatan produksi mutu produk dan diversifikasi sub sektor peternakan sehingga terpenuhi pangan asal hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH).

Pada tahun 2016 bidang Peternakan dan UPTD Rumah Potong Hewan mendapatkan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp. 1.597.767.500,- yang terealisasi didalam empat kegiatan yaitu : a). *Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan*, b). *Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan*, c). *Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Peternakan dan Pengolahan Informasi Pasar atas Hasil Produk Peternakan*, d). *Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Pemotongan Hewan*.

Dari Alokasi anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 1.550.821.830,- (97,06%) sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. Dari pencapaian ini dapat dilihat bahwa program yang dilaksanakan di Bidang Peternakan dan UPTD RPH telah mencapai target.

Pencapaian yang telah dilakukan oleh Bidang Peternakan di tahun 2016 ini antara lain adalah Pelayanan kesehatan hewan dari target 350.000 ekor telah terealisasi sebanyak 100%, pemeriksaan sampel Pangan Asal Hewan (PAH) dari target 100 sampel terealisasi sebanyak 100 sampel, dapat dikendalikannya penyakit zoonosis (penyakit hewan menular ke manusia) ditandai dengan berkurangnya kasus penyakit rabies dari 19 kasus positif (tahun 2015) menjadi tidak ada kasus positif (tahun 2016) dan tidak terjadinya kasus Avian Influenza (AI). Peningkatan populasi ternak sapi sebanyak 73 ekor dari hasil kegiatan Inseminasi Buatan (IB) Tahun 2015. Selain itu pelaksanaan kegiatan operasi pasar daging sapi di Kota Jambi menjelang hari raya Idul Fitri telah membantu masyarakat Kota Jambi dalam mendapatkan daging sapi yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) dengan harga yang terjangkau dan kegiatan operasi pasar daging sapi ini juga mempengaruhi tidak terjadinya lonjakan harga daging sapi menjelang hari raya Idul Fitri.

4.2.2. URUSAN KEHUTANAN

Pembangunan Urusan Kehutanan bertujuan untuk mewujudkan peningkatan pemenuhan ratio Ruang Terbuka Hijau sebesar 30 % secara bertahap, mengembangkan dan mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta meningkatkan kualitas dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan urusan Kehutanan di Kota Jambi dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Jambi. Pada tahun 2016 pada Bidang Kehutanan memperoleh alokasi anggaran

belanja langsung sebesar Rp. 1,906,355,000,- dengan realisasi sebesar Rp.1,755,522,000,- dengan realisasi fisik sebesar 98,57 %.

Berkenaan dengan alokasi anggaran tersebut, telah dilaksanakan Program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengembangan Penanaman dan Pengadaan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota
Alokasi Anggaran Rp. 1.382.780.000,- dengan realisasi fisik 99,12 %. Dana yang digunakan untuk menambah sarana prasarana di Hutan Kota sebesar 3 % yaitu dari 71 % menjadi 74%.
- 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan.
Alokasi Anggaran Rp. 72.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dana yang digunakan untuk melaksanakan pembinaan peredaran hasil hutan pada 29 industri hasil hutan.
- 3) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian RTH Hutan Kota
Alokasi anggaran Rp. 451.575.000,- dengan realisasi fisik 96,58%, dana tersebut digunakan untuk melaksanakan pengaman hutan kota, patrol peredaran hasil hutan, patrol kebakaran hutan dan lahan dan tersedianya bahntuan bahan pagar lingkungan pada P2WKSS, PHBS.

Rasio RTH terhadap luas wilayah sesuai UU No. 26 Tahun 2007 adalah 30%, dimana pada tahun 2015 telah dilakukan pengadaan lahan sebanyak 7,17 Ha dari total rencana 94 Ha dilokasi Kel. Bagan Pete, yang terealisasi baru mencapai 41,2 Ha. Untuk tahun 2016 target 9,00% dari luas wilayah semestinya sudah mencapai 2191,63 Ha namun baru terealisasi sebesar 1224.17 Ha atau 6.97%.

Untuk pengembangan dan pengelolaan hutan Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain : penganekaragaman hayati dengan menanam beberapa jenis tanaman, sampai tahun 2015 telah ada 222 jenis tanaman, pengendalian peredaran hasil hutan pada industri pengolahan hasil hutan sebesar 87% pada 25 industri, meningkatkan penghijauan lingkungan perkotaan sebesar 3% dan mensukseskan gerakan penanaman 1 milyar pohon.

Disamping menyelenggarakan mengembangkan, mengelola, meningkatkan kualitas dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau kehutanan, Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Jambi juga mempunyai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan hutan. Pada tahun 2016 realisasi PAD dari pengelolaan hutan adalah sebesar Rp. 45.475.000,- atau sebesar 45,48 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.-. Target PAD dalam pengelolaan hutan ini dihasilkan pada retibusi masuk hutan kota Muhammad Sabki.

4.2.3. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral tidak dilaksanakan, karena Kota Jambi tidak memiliki daerah pertambangan dan SDA lainnya. Namun Pemerintah Kota Jambi tetap melakukan

kebijakan pusat yang terkait dengan urusan energi yang dilakukan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Jambi.

Pada tahun 2016 Bagian Perekonomian Setda Kota Jambi dialokasikan anggaran sebesar Rp. 102.098.000,- untuk kegiatan Pengendalian Produksi dan Distribusi. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk melaksanakan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang ada di Kota Jambi. Dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program Nasional Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 kg, Bagian Perekonomian Setda Kota Jambi melaksanakan koordinasi antar Dinas/Instansi Konsultan, PT. Pertamina, Pemerintah Provinsi Jambi dan Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM RI tentang Pelaksanaan Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg di Kota Jambi, membentuk Tim Pendukung Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 kg di Kota Jambi dan melakukan Pengawasan dan Pemantauan terhadap pendistribusian Paket LPG 3 kg pada 11 Kecamatan di 62 Kelurahan dalam Kota Jambi.

4.2.4. URUSAN PARIWISATA

Urusan Pariwisata merupakan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan (Disporabudpar) Kota Jambi. Penyelenggaraan Urusan Pariwisata ditujukan untuk meningkatkan peran pariwisata yang berbasis potensi daerah serta memperhatikan kearifan lokal melalui peningkatan kunjungan wisatawan, penyelenggaraan event dan promosi pariwisata didalam dan luar daerah serta mengikuti event pariwisata tingkat nasional/internasional.

Anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Pariwisata pada tahun 2016 sebesar Rp. 816.357.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 658.432.500,- atau 80,65%, dan realisasi fisik sebesar 82,00%. Penyerapan anggaran tidak maksimal dikarenakan ada beberapa Event keluar daerah yang tidak dapat dilaksanakan.

Pada tahun 2016, untuk menyelenggarakan Urusan Pariwisata dijabarkan kedalam Program Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Budaya dan Pariwisata dengan kegiatan Pengembangan dan Promosi Pariwisata Daerah. Adapun pencapaian program dan kegiatan pada tahun 2016 diantaranya adalah terselenggaranya Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan melalui Pelaksanaan Lomba Perahu Angsa, Haul Tuanku Keramat Tambak dan Haul Pangeran Wiro Kusumo serta Pemilihan Bujang Gadis.

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh Urusan Pariwisata adalah terselenggaranya event berskala nasional/internasional. Pencapaian IKU pada tahun 2016 ditargetkan 2 kali terselenggaranya event berskala nasional/internasional. Urusan Pariwisata pada tahun 2016 telah melakukan berbagai

upaya untuk mencapai target IKU tersebut, dan terlaksana 2 kali menyelenggarakan event berskala nasional/internasional, yaitu pelaksanaan Haul Pangeran Wiro Kusumo (Kesultanan Jambi) pada bulan Januari 2016 dan Haul Tuanku Keramat Tambak (Habib Husain Bin Ahmad Baragbah) pada bulan Februari 2016 di Seberang Kota Jambi yang dihadiri para peziarah dari berbagai daerah dan manca negara. Dengan demikian, dari 2 event berskala nasional/internasional yang ditargetkan telah terpenuhi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pariwisata adalah keterbatasan dana dan kurangnya inovasi untuk pengembangan destinasi wisata di Kota Jambi.

4.2.5. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pada tahun 2016 bidang perikanan mendapatkan alokasi Anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 466.300.000,- dan dari APBD II sebesar Rp. 1.636.020.000,- sehingga total anggaran pada tahun 2016 untuk bidang perikanan adalah sebesar Rp. 2.102.320.000,- yang terealisasi didalam empat kegiatan yaitu ;

- a. Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidayaan ikan, dimana kegiatan ini dalam rangka mendukung produksi perikanan budidaya yaitu bantuan paket Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 20 Unit dimana perunit diberikan juga bantuan benih ikan nila 20.000 ekor, pakan 3.000 Kg, bantuan benih dan pakan ikan, denfarm lele sistem bioflock, statistic budidaya dan forum budidaya/perbenihan.
- b. Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul, kegiatan ini didukung Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kelautan dan perikanan dan APBD II, dimana kegiatan ini dalam rangka untuk mendukung produksi benih ikan. Kegiatan yang dilaksanakan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kelautan dan Perikanan yaitu : rehab berat rumah karyawan BBI Danau Teluk, pengadaan perahu bermotor (fiberglass) 1 unit da perahu tanpa motor (fiberglass) 2 unit, pakan untuk calon induk dan happa sebanyak 8 buah.
- c. Kegiatan pengelolaan dan pemesanan produksi perikanan, kegiatan ini berupa bantuan paket sarana pengolahan sebanyak 11 paket, Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) 2 kali untuk 300 orang, Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Perikanan untuk 50 Orang, lomba UMKM pengolahan hasil perikanan 1 kali dan pengujian sample produk hasil perikanan.
- d. Kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan, dimana kegiatan ini dalam rangka untuk mendukung kelestarian sumber daya perikanan terutama Perairan Umum Daratan (PUD),

bantuan benih dan pakan ikan lele untuk pemanfaatan lahan pekarangan, bantuan kolam terpal sebanyak 5 unit (terdiri dari kolam terpal, pakan per unit 90 kg dan benih ikan lele per unit 1.000 ekor).

Dari Alokasi Anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 2.102.320.000,- secara umum kegiatan sudah terlaksana dengan baik, dimana pencapaian realisasi fisik pekerjaan sebesar 97,8 % sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.990.629.850,- atau sebesar (94,69 %).

Pencapaian yang telah dilakukan pada bidang perikanan tahun 2016 ini antara lain adalah produksi perikanan di Kota Jambi pada tahun 2016 mencapai 2.612,71 ton yang terdiri dari produksi perairan umum (penangkapan) sebesar 908,9 ton, budidaya kolam sebesar 984,23 ton dan keramba/jarring apung sebesar 719,58 ton. Bila dibandingkan produksi tahun 2015 sebesar 3.008 ton, maka pada tahun 2016 secara keseluruhan terjadi penurunan sebesar 395,29 ton atau sebesar -13,14%.

Selama tahun 2016 produksi benih yang dihasilkan sebanyak 48.358.280 ekor, jika dibandingkan dengan produksi benih ikan pada tahun 2015 sebanyak 46.348.050, maka pada tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar 2.010.230 ekor atau meningkat sebesar 4,4%. Konsumsi ikan masyarakat Kota Jambi pada tahun 2016 sebesar 33,3 kg/kap/Tahun, jika dibandingkan konsumsi ikan Kota Jambi tahun 2015 sebesar 33,1 kg/kap/Tahun, maka pada tahun 2016 meningkat sebesar 0,2 kg/kap/Tahun atau meningkat sebesar 0.6%.

4.2.6. URUSAN PERDAGANGAN

Urusan perdagangan merupakan urusan pilihan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Pasar Kota Jambi. Penyelenggaraan Urusan Perdagangan ditujukan untuk peningkatan peredaran barang dan jasa yang sesuai standar, terwujudnya peningkatan jumlah usaha formal dan informal, tercapainya target penerimaan retribusi pelayanan perpasaran sebagai salah satu penyumbang PAD Kota Jambi, meningkatkan sarana dan prasarana pasar dan sarana penunjang lainnya untuk mewujudkan pasar bersih, kondusif dan representatif, serta meningkatkan pelayanan, pembinaan, penataan dan penertiban pedagang pasar dan PKL secara berkesinambungan dan konsisten guna mewujudkan perilaku yang berakhlak dan berbudaya.

Anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Perdagangan pada tahun 2016 sebesar Rp. 9.073.238.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 8.571.690.240,- atau 94,47%. Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan urusan perdagangan diantaranya adalah:

1. Terlaksananya lanjutan pembangunan Pasar Olak Kemang di Kecamatan Danau Teluk.
2. Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan, pameran-pameran, bazar, pasar murah dan pemberian bantuan hibah kepada masyarakat.
3. Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekonomian di pasar rakyat.
4. Terlaksananya penertiban serta pengamanan pasar pada hari-hari besar dengan tujuan untuk meningkatkan ketertiban pedagang kaki lima serta mewujudkan Pasar Kota Jambi yang bersih dan tertib sekaligus rasa aman di lingkungan pasar pada hari-hari besar.
5. Penerimaan retribusi pelayanan pasar dan retribusi pasar grosir atau pertokoan (sewa) pada tahun 2016 ditargetkan Rp. 4.000.000.000,- tercapai (realisasi) Rp. 3.709.525.403,- (92,74%).

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, pada tahun 2016 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh Urusan Perdagangan adalah peningkatan cakupan bina perdagangan/usaha informal sebesar 2,80% atau 126 unit usaha, terjadi peningkatan target sebesar 5,30% atau 238 unit usaha, rasio peningkatan sarana dan prasarana pasar-pasar tradisional pemerintah sebesar 72,25% dan peningkatan rasio PKL yang tertata sebesar 55 %.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Perdagangan adalah:

1. Kesiapan sumber daya manusia pada IKM, pola kemitraan yang belum berjalan secara optimal, juga pengaruh pasar bebas dan persaingan usaha yang semakin ketat.
2. Target Retribusi Daerah tahun 2016 sebesar Rp. 4.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.709.525.403,- atau 92,74%. Target yang tidak tercapai disebabkan masih rendahnya tingkat kesadaran sebagian pedagang kaki lima untuk membayar retribusi pasar tepat waktu dan penghitungan target sewa pasar dihitung berdasarkan jumlah semua Ruko, Toko, Kios dan Los/Petak yang ada termasuk yang kosong, sehingga Kios/Toko yang kosong menjadi tunggakan pada target pendapatan.

4.2.7. URUSAN PERINDUSTRIAN

Urusan Perindustrian merupakan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi. Penyelenggaraan Urusan Perindustrian ditujukan untuk peningkatan daya saing produk lokal, peningkatan sarana dan prasarana IKM, pembinaan dan peningkatan jumlah IKM serta peningkatan jangkauan wilayah pemasaran produk IKM.

Anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Perindustrian pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.800.493.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.569.072.384,- dan realisasi fisik sebesar 100 %, pencapaian realisasi penyerapan anggaran sebesar 87,15 %.

Pada tahun 2016 kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan perindustrian antara lain melaksanakan pelatihan-pelatihan, sosialisasi, penyuluhan, pameran, lomba, pemberian bantuan hibah barang kepada masyarakat dan revitalisasi rumah batik sebanyak 3 unit di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk dan Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan. Revitalisasi ini diperuntukan kepada pengrajin yang telah menerima sertifikat OVOP (One Village One Produk) dari Kementerian Perindustrian RI pada tahun 2015.

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh Urusan Perindustrian adalah peningkatan jumlah IKM mandiri, dan peningkatan pertumbuhan industri. Pencapaian jumlah IKM Mandiri pada tahun 2016 tercatat sebanyak 402 IKM melebihi target IKU RPJMD dan pertumbuhan industri pada tahun 2016 tercatat 2.884 industri atau meningkat dari tahun 2015 dengan jumlah 2.654 industri atau 7,98%, target ini melebihi pada RPJMD untuk tahun 2016 sebesar 3,10%.